

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap organisasi menggunakan akuntansi sebagai sarana komunikasi. Proses akuntansi adalah mencakup mencatat, meringkas, melaporkan, dan menganalisa dari setiap transaksi. Tujuan akuntansi adalah untuk memungkinkan entitas merencanakan secara strategis pengeluaran masa depan yang akan menghasilkan keuntungan. Manajemen diharapkan dapat memahami dengan baik keuangan entitas jika pencatatannya akurat. Menerbitkan laporan keuangan adalah fungsi utama dari akuntansi. Organisasi di sektor publik, khususnya instansi pemerintah, wajib mengungkapkan laporan keuangannya kepada masyarakat umum (Ariyanto, 2020).

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang dipercayakan kepada pemerintah pusat dan daerah merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas administrasi (UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah). Untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyusunan laporan keuangan harus mengacu pada standar akuntansi pemerintah (SAP) dan disampaikan dengan tepat waktu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjabarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta merepresentasikan kemampuannya dalam mengakomodasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial. Oleh karena itu, laporan keuangan penggunaan APBD harus

disediakan untuk menjaga akuntabilitas atas hasil yang dicapai, pemerintah juga berkewajiban untuk bertanggungjawab atas dana yang diperoleh dari iuran masyarakat dan pajak (Hendri, 2020). Laporan keuangan pemerintah disusun oleh setiap entitas perangkat daerah, yang selanjutnya menjadi aturan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Faktanya, di Indonesia masih terdapat masyarakat dengan kualitas data akuntansi yang kurang baik. Hal ini dibuktikan berdasarkan laporan audit IHPS I tahun 2021 bahwa 541 (99%) dari 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2020. Terdapat satu pemerintah daerah yang belum menyerahkan laporan keuangan kepada BPK (badan pemeriksa keuangan), yaitu pemerintah kabupaten Waropen, Papua. Terhadap 541 LKPD tahun 2018 tersebut BPK menerbitkan 486 (90%) opini wajar tanpa pengecualian (WTP), 49 (9%) opini wajar dengan pengecualian (WDP), 4 (0,7%) opini tidak menyatakan pendapat (TMP), dan 2 (0,3%) opini tidak wajar (TW) (sumber: <https://jateng.bpk.go.id/ihktisar-hasil-pemeriksaan-semester-ihps/>).

Dari hasil pemeriksaan audit BPK terhadap LKPD kabupaten Demak untuk jangka waktu 6 tahun dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Demak

Tahun	Opini BPK
2016	Wajar Dengan Pengecualian
2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Wajar Tanpa Pengecualian
2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2020	Wajar Tanpa Pengecualian
2021	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: <https://jateng.bpk.go.id/lhp-lkpd/>

Meski pernyataan BPK adalah WTP masih terdapat catatan terhadap LKPD kabupaten Demak mengenai ketaatan terhadap peraturan hukum dan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), terkait SPI catatan yang ditemukan antara lain meliputi belum tertatanya barang milik daerah (sumber: suara merdeka). Kurangnya apresiasi pemerintah terhadap sumber daya manusia juga dirasa oleh karyawan pada beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD) di Kabupaten Demak (Munir, 2023). Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Demak menyatakan bahwa menjaga laporan keuangan yang berkualitas tinggi memerlukan evaluasi berkala terhadap kelemahan yang masih ada. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelemahan tersebut.

Dengan adanya catatan tersebut perlu dikakukan penelitian mengenai kualitas LKPD pada OPD di Kabupaten Demak. Laporan keuangan adalah informasi akuntansi yang disediakan oleh organisasi kepada pengguna laporan keuangan untuk tujuan membantu pengguna dalam mengambil keputusan mengenai alokasi modal dengan organisasi yang bersangkutan (Maulia, 2014). Untuk perbandingan dengan laporan tahun sebelumnya, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan SAP yang berlaku. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, tujuan laporan keuangan ditetapkan untuk pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada unit pelaporan dan penerapan prinsip-prinsip untuk mencapai tujuan secara berkala.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA). Pemerintah daerah harus menerapkan sistem aplikasi untuk pelaporan keuangan untuk menerapkan

manajemen keuangan daerah yang cepat, akurat dan tepat (Usman, 2012:70). Fokus implementasi berada pada perilaku, kegiatan, atau mekanisme sistem. Implementasi lebih dari sekedar kegiatan, akan tetapi juga merupakan aktivitas yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. BPK mengembangkan sistem informasi pengelolaan daerah untuk memproses data dari transaksi keuangan menjadi laporan keuangan. Sistem aplikasi berbasis teknologi ini dibuat untuk membantu pemerintah daerah dalam mencapai akuntabilitas baik ditingkat pelaporan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) maupun pada tingkat pelaporan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Dengan adanya pembentukan sistem aplikasi tersebut, pemerintah daerah akan mendapatkan bantuan dalam menyusun perencanaan dan anggaran, melaksanakan pengelolaan APBD, serta memastikan akuntabilitas APBD terjaga. Dengan menggunakan teknologi yang bersifat generik, teknologi *client/server* dan informasi yang komprehensif, lengkap dan akurat, aplikasi SIMDA dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengelola keuangan daerah. Implementasi SIMDA dengan baik akan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas yang tinggi, sesuai dengan penelitian (Gunadi, 2017), (Sinta dan Mahirun, 2021) bahwa penerapan SIMDA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbanding dengan (Alfian, 2015) bahwa penerapan SIMDA berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan, menurutnya diperlukannya peningkatan pada kualitas input data serta pemahaman pengguna tentang SIMDA.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah mengenai kualitas sumber daya manusia. Sebuah perusahaan memiliki nilai yang baik karena kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan sumber daya manusianya. Keberhasilan suatu perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia, hal ini menjadi tolak ukur entitas dalam menghasilkan laporan keuangan (Emilda, 2014). Memiliki kualitas sumber daya yang baik. Sejalan dengan studi yang dilakukan (Ariyanto, 2020), (Sinta dan Mahirun, 2021) bahwa kualitas SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang baik umumnya dipengaruhi oleh semakin tingginya kompetensi sumber daya manusia baik pada keterampilan, pengetahuan, dan perilaku dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Berbeda dengan penelitian (Salleh, 2012) yang menyatakan kualitas SDM berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan, karena informasi yang minim mengenai tugas staf dan minimnya pelatihan.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan standar akuntansi pemerintah. Secara umum standar akuntansi merupakan acuan yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan kepada pihak selain entitas yang memegang otoritas tertinggi (Hariadi, Restianto, dan Bawono, 2010:115). PP No. 24 Tahun 2005 dirubah pemerintah menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Untuk mencapai pengukuran kinerja yang baik, pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab, penting untuk menerapkan penggunaan basis akrual. Dalam penelitian (Mardiana dan Fahlevi, 2017), (Pujanira dan Taman 2017)

menyatakan penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan (Kusuma dkk., 2017) yang menyatakan penerapan SAP berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah dukungan manajemen puncak. Manajemen merupakan pemimpin yang bertanggungjawab atas keseluruhan manajemen organisasi, menentukan garis tindakan dan mengarahkan interaksi organisasi dengan lingkungan (Rahmalia, 2010). Adanya tanggungjawab otoritatif mengikuti konsistensi dalam mengadopsi laporan keuangan yang andal menurut standar pemerintah. Dalam penelitian (Rahayu, 2012) dan (Ikhsan dan Bustamam, 2016) menyatakan dukungan manajemen puncak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan (Sinta dan Mahirun, 2021) yang menyatakan dukungan manajemen puncak berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan, dikarenakan manajemen puncak tidak menumbuhkan motivasi dan kepercayaan diri mereka.

Karena banyaknya penelitian yang tidak konsisten pada beberapa riset terdahulu, maka dilakukan penelitian kembali yang disalin dari Khoirul abidin, Affifudin dan Junaidi (2018) yang berjudul “pengaruh implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan”. Penelitian ini memiliki kurang lebih perbedaan dengan peneliti terdahulu, yaitu penambahan variabel independen dukungan manajemen puncak yang direplikasi dari Hidayakh dkk., (2020). Pemilihan variabel dukungan manajemen puncak

karena ada keyakinan bahwa dukungan manajemen puncak dapat berperan dalam mempengaruhi kesadaran dan pentingnya kualitas laporan keuangan diseluruh OPD. Selain itu, juga dapat mempengaruhi motivasi dan tanggungjawab para staf terkait dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Perbedaan kedua yaitu pada objek penelitian, dimana penelitian Abidin dkk., (2018) meneliti objek di kota Malang dan pada penelitian ini merubah objek penelitian menjadi OPD kabupaten Demak.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis bermaksud untuk mengajukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kabupaten Demak”**.

1.2 Ruang Lingkup

Berikut adalah ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini:

1. Variabel independen atau yang mempengaruhi yaitu implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan dukungan manajemen puncak.
2. Variabel yang dipengaruhi adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Objek yang diambil adalah OPD Kabupaten Demak.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan pemilihan judul, timbul perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah implementasi SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD?
2. Apakah kualitas sumber daya berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD?
3. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD?
4. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh implementasi SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD
2. Untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD
3. Untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD
4. Untuk menguji pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD

1.5 Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, tulisan ini dapat membantu akademisi dan profesional dengan ide-ide untuk mempelajari dan mengembangkannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Tulisan ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

b. Bagi Akademisi

Tulisan ini dapat digunakan sebagai sumber untuk penelitian selanjutnya dan untuk mendukung riset terdahulu.

c. Bagi Penulis

Penulis dapat belajar dari kajian ini bagaimana memajukan pengetahuan ilmiah dan mengembangkan potensi penelitian pemerintah daerah.